

Matriks Capaian RAN OGI B06 LKPP 2023-2024

No.	Ukuran Keberhasilan	Renaksi	Progres/Capaian B06
		B06 (2023)	
1	Publikasi transaksi Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah di e-katalog	Dilaksanakannya rapat yang membahas komponen informasi transaksi e-katalog yang akan dipublikasi	<p>- Telah dilakukan pertemuan dengan PT Telkom Indonesia dan Pengelola Katalog Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka Pengembangan Dashboard Monev Dalam Rangka Pemantauan Produk dan Transaksi Katalog Elektronik pada tanggal 25-27 Mei 2023. Agenda pembahasannya adalah membahas kebutuhan pengelola katalog elektronik terkait ketersediaan dashboard monev pada katalog elektronik.</p> <p>- Hasil Rapat tersebut antara lain adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelola Katalog Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki kebutuhan untuk dashboard yang dapat menampilkan terkait dengan perkembangan penayangan produk, komposisi jumlah produk tayang berdasarkan jenis produknya, detail dari transaksi E-purchasing yang dilakukan oleh PPK/PP pada Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 2) Kebutuhan dashboard ini juga diharapkan bisa disajikan secara real-time dan memiliki tampilan dashboard yang mudah dipahami oleh para pengguna, mengingat kebutuhan dashboard ini selain untuk kegiatan monitoring-evaluasi produk dan transaksi juga dibutuhkan oleh para pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan. 3) Pengelola Katalog Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memiliki kebutuhan untuk dapat mengunduh detail transaksi E-purchasing dari dashboard monev tersebut.
2	Publikasi secara rinci informasi pengadaan darurat	Pembahasan terkait komponen informasi pengadaan darurat yang akan ditambahkan dalam dashboard LPSE dengan melibatkan OMS	<p>- Telah dilakukan rapat Ko-kreasi RAN OGI 2023-2024 antara LKPP yang terdiri dari perwakilan Direktorat Sistem Pengadaan Digital, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, dan Biro Perencanaan dan Keuangan dengan mengundang ICW sebagai OMS pada tanggal 7 Juni 2023, dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembahasan terkait komponen informasi pengadaan darurat yang akan ditambahkan dalam dashboard LPSE 2) Pembahasan terkait dengan data kinerja penyedia yang akan dipublikasi di SIKaP 3) Pembahasan mekanisme/bentuk kode unik untuk menyatukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dalam satu objek program yang sama <p>- Hasil dari rapat tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direktorat Sistem Pengadaan Digital dalam mengembangkan aplikasi menyesuaikan dengan kebijakan yang ada. Saat ini ICW sedang menyusun kajian terkait dengan masukan dalam pengembangan aplikasi SPSE darurat, SIKaP, dan Mekanisme/bentuk kode unik untuk menyatukan pekerjaan yang terkait pada SPSE. 2) Apabila kajian tertulis tersebut telah selesai, akan dijadikan bahan masukan untuk D22 dalam pengembangan aplikasi tersebut. 3) Untuk integrasi antara SIKaP dengan Beneficial Ownership saat ini telah selesai dengan menampilkan data dari AHU 4) Untuk publikasi informasi sudah sesuai dengan peraturan yang ada, namun memang tidak seluruh data dapat disediakan oleh LKPP. Terdapat beberapa dokumen yang memang dimiliki oleh masing masing UKPBJ K/L/Pemda <p>- Hingga saat ini, informasi pengadaan darurat yang telah tersedia dan dapat dilihat pada SPSE meliputi hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nilai paket, 2) nilai kontrak (realisasi), 3) nilai PDN, 4) nilai UMK, 5) tanggal paket selesai, dan 6) nama penyedia

No.	Ukuran Keberhasilan	Renaksi	Progres/Capaian B06
		B06 (2023)	
3	Mendorong efektivitas kanal e-pengaduan dalam menangani pengaduan masyarakat	Persiapan integrasi inspektorat K/L/PD di dalam sistem e-pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai dengan bulan Mei 2023, terdapat 83 Inspektorat K/L/PD yang telah bergabung dengan sistem e-pengaduan - Menindaklanjuti kendala pada sistem e-pengaduan yang belum dapat digunakan, saat ini pada laman e-pengaduan telah diinformasikan mengenai alternatif penyampaian pengaduan melalui surat yang disertai dengan user guide persuratan e-office LKPP dan format surat pengaduan. Pengaduan yang disampaikan melalui surat selama aplikasi e-pengaduan belum dapat digunakan adalah sebanyak 84 pengaduan - Akan diadakan rapat antara Pusat Data dan Informasi LKPP, Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum LKPP dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menindaklanjuti kendala pada sistem e-pengaduan.
4	Pengembangan database Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) yang terintegrasi dan terbuka	Pembahasan terkait data kinerja penyedia yang akan dipublikasi di SIKAP dengan melibatkan OMS	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan rapat Ko-kreasi RAN OGI 2023-2024 antara LKPP yang terdiri dari perwakilan Direktorat Sistem Pengadaan Digital, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, dan Biro Perencanaan dan Keuangan dengan mengundang ICW sebagai OMS pada tanggal 7 Juni 2023, dengan agenda: <ul style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan terkait komponen informasi pengadaan darurat yang akan ditambahkan dalam dashboard LPSE 2. Pembahasan terkait dengan data kinerja penyedia yang akan dipublikasi di SIKaP 3. Pembahasan mekanisme/bentuk kode unik untuk menyatukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dalam satu objek program yang sama - Hasil dari rapat tersebut: <ul style="list-style-type: none"> 1) Direktorat Sistem Pengadaan Digital dalam mengembangkan aplikasi menyesuaikan dengan kebijakan yang ada. Saat ini ICW sedang menyusun kajian terkait dengan masukan dalam pengembangan aplikasi SPSE darurat, SIKaP, dan Mekanisme/bentuk kode unik untuk menyatukan pekerjaan yang terkait pada SPSE. 2) Apabila kajian tertulis tersebut telah selesai, akan dijadikan bahan masukan untuk D22 dalam pengembangan aplikasi tersebut. 3) Untuk integrasi antara SIKaP dengan Beneficial Ownership saat ini telah selesai dengan menampilkan data dari AHU

No.	Ukuran Keberhasilan	Renaksi	Progres/Capaian B06
		B06 (2023)	
5	Publikasi informasi atau dokumen Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang diatur dalam Perki No. 1 Tahun 2021 di SPSE sesuai dengan kewenangan LKPP	1. Pembahasan terkait informasi yang wajib dibuka sesuai Perki No. 1 Tahun 2021 yang berada di bawah kewenangan LKPP dengan melibatkan OMS	<p>- Terkait informasi yang telah dibuka dan berada di bawah kewenangan LKPP, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kinerja Perencanaan PBJ melalui RUP SIRUP termasuk dashboard Profil RUP selalu terupdate secara berkala dan dapat diakses oleh publik 2) Profil Kinerja PBJ dapat diakses publik melalui tautan https://pmep.lkpp.go.id dan Laporan Pengadaan K/L dan Pemda selalu terupdate setiap minggu 3) Profil Kinerja PDN dapat diakses publik melalui tautan https://lkpp.bigbox.co.id/public/page/id/860 4) Dashboard ITKP K/L dan Pemda dapat diakses melalui https://sirup.lkpp.go.id dan https://pmep.lkpp.go.id 5) Dashboard Kinerja PBJ juga dapat dimonitoring melalui AMEL yang langsung terinstall pada masing-masing LPSE <p>- Hal tersebut telah disampaikan pada rapat Ko-kreasi RAN OGI 2023-2024 antara LKPP yang terdiri dari perwakilan Direktorat Sistem Pengadaan Digital, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, Biro Hubungan Masyarakat dan Umum, dan Biro Perencanaan dan Keuangan dengan mengundang ICW sebagai OMS pada tanggal 7 Juni 2023.</p>
		2. Pembahasan mekanisme/bentuk kode unik untuk menyatukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dalam satu objek program yang sama	<p>- Telah dilakukan rapat Ko-kreasi RAN OGI 2023-2024 antara LKPP yang terdiri dari perwakilan Direktorat Sistem Pengadaan Digital, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, Biro Hubungan Masyarakat dan Umum, dan Biro Perencanaan dan Keuangan dengan mengundang ICW sebagai OMS pada tanggal 7 Juni 2023, dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembahasan terkait komponen informasi pengadaan darurat yang akan ditambahkan dalam dashboard LPSE 2) Pembahasan terkait dengan data kinerja penyedia yang akan dipublikasi di SIKaP 3) Pembahasan mekanisme/bentuk kode unik untuk menyatukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dalam satu objek program yang sama <p>- Hasil dari rapat tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direktorat Sistem Pengadaan Digital dalam mengembangkan aplikasi menyesuaikan dengan kebijakan yang ada. Saat ini ICW sedang menyusun kajian terkait dengan masukan dalam pengembangan aplikasi SPSE darurat, SIKaP, dan Mekanisme/bentuk kode unik untuk menyatukan pekerjaan yang terkait pada SPSE. 2) Apabila kajian tertulis tersebut telah selesai, akan dijadikan bahan masukan untuk D22 dalam pengembangan aplikasi tersebut. 4) Untuk publikasi informasi sudah sesuai dengan peraturan yang ada, namun memang tidak seluruh data dapat disediakan oleh LKPP. Terdapat beberapa dokumen yang memang dimiliki oleh masing masing UKPBJ K/L/Pemda <p>- Terkait mekanisme/bentuk kode unik yang menyatukan pekerjaan-pekerjaan yang Terkait dalam satu objek program yang sama, kegiatan yang telah dilakukan oleh LKPP meliputi: Analisa belanja pemerintah dengan menggunakan kode unik berdasarkan kinerja realisasi PBJ K/L dan Pemda bukan kinerja perencanaan. kode unik sedang tahap pengembangan oleh Direktorat Sistem Pengadaan Digital dan Direktorat Pasar Digital Pengadaan</p>
6	Penguatan masyarakat dalam keterlibatan dan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa	1. Pembahasan MOU antara LKPP dengan OMS	<p>- Telah dilaksanakan rapat Ko-kreasi dengan agenda pembahasan terkait capaian target B06 untuk ukuran keberhasilan ke-6 pada tanggal 26 Juni 2023 yang dihadiri oleh perwakilan LKPP, perwakilan ICW dan TII sebagai unsur OMS.</p> <p>- Akan dilaksanakan Ko-kreasi antara LKPP dengan ICW dan TII dalam peningkatan kompetensi kepada masyarakat tentang pengawasan Pengadaan Barang/Jasa</p>

Nomor : 14397/D.2.2/06/2023

07 Juni 2023

Hal : Rapat Ko Kreasi untuk RAN OGI 2023-2024

Yth. Indonesia Corruption Watch (ICW)
di Tempat

Dalam rangka melaksanakan komitmen RAN OGI VII Tahun 2023-2024 dengan tujuan mendorong transparansi dan partisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menghadiri rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 7 Juni 2023

Waktu : 13:30 - 15:00 WIB

Tempat : 505 dan Online

Agenda : 1. Pembahasan terkait komponen informasi pengadaan darurat yang akan ditambahkan dalam dashboard LPSE
2. Pembahasan terkait dengan data kinerja penyedia yang akan dipublikasi di SIKaP
3. Pembahasan mekanisme/bentuk kode unik untuk menyatukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dalam satu objek program yang sama

Link Rapat : <https://us02web.zoom.us/j/88450771649?pwd=REhKdTdXRmVPdHp1RjZLb1F5WklCZz09>

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Sistem Pengadaan Digital,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Patria Susantosa

Tembusan :

Plt. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office LKPP. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id> atau kunjungi halaman <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : TONjpi

Nomor Tiket : SK202306070001

Peserta Undangan

1. Edi Kristiyanto - Analis Kebijakan Madya Biro Perencanaan dan Keuangan
2. Januar Indra - Analis Kebijakan Madya Direktorat Sistem Pengadaan Digital
3. Resa Anggriani - Perencana Muda Biro Perencanaan dan Keuangan
4. Linda Mikowati - Analis Kebijakan Muda Direktorat Sistem Pengadaan Digital
5. Sugianto - Analis Kebijakan Muda Direktorat Sistem Pengadaan Digital
6. Rizky Dwi Raharjo - Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Direktorat Sistem Pengadaan Digital
7. Audita Octaviani - Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Direktorat Sistem Pengadaan Digital
8. Niken Mustikarini - Analis Kebijakan Pertama Direktorat Sistem Pengadaan Digital
9. Eko Nirwanto Putro Hanardi - Analis Kebijakan Pertama Direktorat Sistem Pengadaan Digital
10. Chika Agishintya - Penyedia Jasa Lainnya(Direktorat Sistem Pengadaan Digital)
11. Tri Yani Elisabeth Nababan - Penyedia Jasa Lainnya(Direktorat Sistem Pengadaan Digital)
12. Dhanu Trinandha - Penyedia Jasa Lainnya(Direktorat Sistem Pengadaan Digital)
13. Tholib Ahmad Hidayah - Penyedia Jasa Lainnya(Direktorat Sistem Pengadaan Digital)
14. Mukti Herlambang - Pranata Hubungan Masyarakat Muda Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
15. Andi Rannualdi - Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
16. Ajeng Widi Hapsari - Penyedia Jasa Lainnya(Biro Hubungan Masyarakat dan Umum)
17. Wieke Puspa Devi - Penyedia Jasa Lainnya(Direktorat Sistem Pengadaan Digital)
18. Salma Muthiah - Penyedia Jasa Lainnya - Sekretaris(Direktorat Sistem Pengadaan Digital)
19. Nina Wuriana - Penyedia Jasa Lainnya(Direktorat Sistem Pengadaan Digital)
20. Afri Dian Setiyani - Pejabat Pengadaan pada Direktorat Sistem Pengadaan Digital
21. Tito Sulistyio - Pejabat Pembuat Komitmen di Direktorat Sistem Pengadaan Digital
22. Budi Setyo Nugroho - Anggota Tim II Evaluasi Pemantauan dan Pelaporan
23. Mahsa Elvina Rahmawyanet - Manggala Informatika Muda Direktorat Sistem Pengadaan Digital
24. Chitra Poespa Prihartini - Penyedia Jasa Lainnya(Direktorat Sistem Pengadaan Digital)
25. Rachmat Taufik Usman - Penyedia Jasa Lainnya (Biro Perencanaan dan Keuangan)
26. Joanne Salres Ramadhani - Perencana Pertama Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia



NOTULENSI

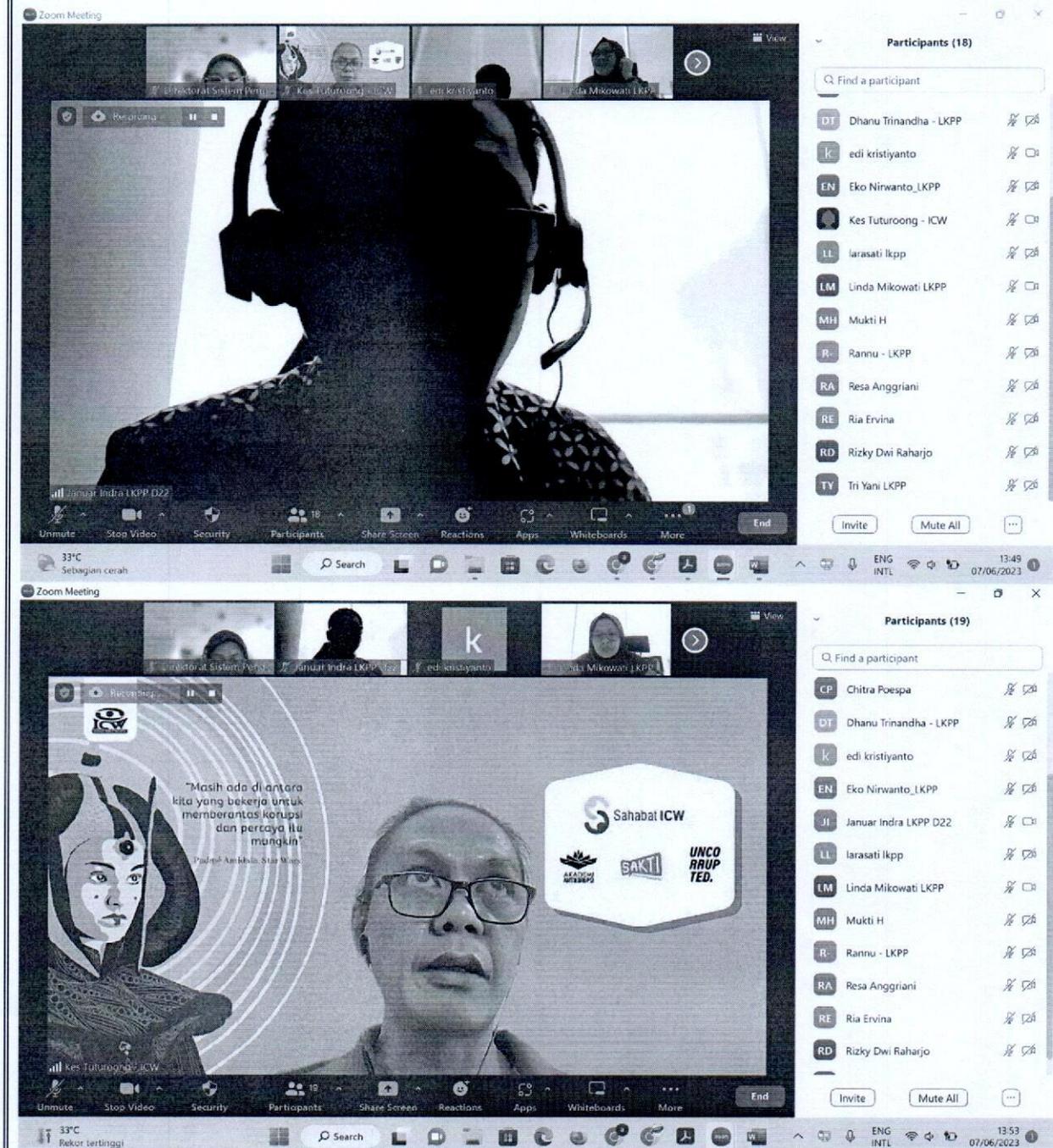
Rapat Ko Kreasi RAN OGI 2023-2024

Hari/Tanggal	: Selasa, 07 Juni 2023
Waktu	: 13.30 – 15.00 WIB
Peserta	: Biro Perencanaan dan Keuangan Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum Direktorat Sistem Pengadaan Digital <i>Indonesia Corruption Watch</i>
<ol style="list-style-type: none">1. Pak Edi: terima kasih atas undangannya, rapat ini juga dalam hal untuk memenuhi renaksi RAN OGI 2023-2024. Semoga dari rapat ini sudah mendapat kesimpulan.2. Pak Januar Indra: arahan pak Direktur saat ini, menunggu masukan-masukan dan tim teknis akan mencatat, terkait kebijakan akan kami sampaikan ke pimpinan terlebih dahulu.3. Audita: pembahasan hari ini terkait dengan renaksi B06, komponen informasi PBJ darurat yang akan ditampilkan di dashboard, pembahasan terkait dengan data kinerja penyedia yang akan ditampilkan di SIKaP, dan pembahasan mekanisme/bentuk kode unik untuk menyatukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dalam satu objek yang sama. Dari LKPP pengembangan dashboard pengadaan darurat saat ini sudah ada pada SPSE 4.5, dari ICW apakah ada masukan terkait informasi yang saat ini sudah kami tampilkan?4. Pak Kas ICW: dari SPSE darurat kelengkapan informasi yang ingin dikejar dari sisi realisasi. Implementasinya seperti apa dan apakah sudah terealisasi.5. Pak Kas ICW: dari ICW sendiri akan disiapkan kajian/rekomendasi terkait dengan informasi apa saja yang dibutuhkan pada pengadaan darurat, SIKaP, dan kode unik. Kajian saat ini yang selesai baru terkait dengan <i>epurchasing</i>, sementara kajian yang masih dalam tahap pengerjaan. Terkait dengan SIKaP ada beberapa hal, secara umum, harapannya di SIKaP lebih terlihat yang sudah teintegrasi dengan <i>blacklist</i>/daftar hitam, apakah penyedia tersebut pernah <i>terblacklist</i>, dan juga diharapkan SIKaP sudah terintegrasi dengan aplikasi dari instansi lain contohnya <i>Beneficial Ownership</i>, dan saat ini penyedia tersebut sedang melakukan berapa pekerjaan. Kami berharap informasi di dalam SIKaP lebih diperkaya. Untuk kajian masih dalam proses.6. Pak Kas ICW: Untuk kode unik, agar pengadaan pemerintah khususnya proyek-proyek besar dapat diidentifikasi dalam satu kesatuan. Contohnya pembangunan bandara atau pasar, saat ini dalam SPSE terdapat banyak tender terkait hal tersebut, baik pekerjaan konsultansinya, seluruh pembelian2 terkait pasar tersebut menjadi satu kesatuan.7. Mba Citra: sejauh ini terkait aplikasi masih menunggu arahan terlebih dahulu.8. Pak Kas ICW: terkait dengan informasi yang boleh dibuka ataupun tidak boleh dibuka sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, tidak semua dokumen yang ada pada daftar tersebut berada di domainnya LKPP, ada yang di domainnya LPSE. Harus diidentifikasi lebih lanjut dokumen apa yang dapat dibuka oleh publik. Apakah dokumen tender setelah selesai dapat diakses oleh publik.9. Mas Mukti: di bulan Februari dari tim LKPP telah Menyusun Data dan Informasi Yang Dipublikasi (DIP) dan Data dan Informasi yang DiKecualikan (DIK). DIP dan DIK nya tidak masuk ke RAN OGI, namun akan dimutakhirkan karena yang ada saat ini jangka waktunya terlalu lama. Saat ini sudah ada dokumennya akan dimutakhirkan pada tahun ini.10. Pak Ji: Apabila ada usulan secara tertulis, berdasarkan usulan tersebut Direktur kami akan menginformasikan ke tim teknis untuk sebisa mungkin menerjemahkan dari kebijakan ke sistem, kalau misal ada list rekomendasi/kajian/ secara tertulis.11. Menampilkan pencatatan pengadaan darurat pada SPSE 4.5.	

12. Pak Ji: tampilan pada SIKaP sendiri tanpa login sudah bisa mencari penyedia di wilayah mana dan kualifikasi mana, ketika di search dapat terlihat penyedia tersebut sudah menang tender berapa kali sehingga terlihat pengalaman mereka. Dari situ kita dapat lihat ada yang pengalamannya banyak, sedikit. Sampai saat ini baru segini yang dapat dilihat oleh publik, apabila ini dirasa kurang lengkap, mohon infonya data apa saja yang perlu dilihat public dan manfaatnya untuk public itu apa. Apabila login menggunakan akun ppk, dapat melihat nilai yang diberikan terhadap penyedia tersebut dengan kepentingan untuk memilih penyedia yang akan melakukan suatu pekerjaan. Apabila memang ini mau di publikasi, mungkin dapat disampaikan juga pada kajiannya kepentingannya untuk apa dipublikasi hal tersebut.

13. Pak Kas ICW: untuk SIKaP sendiri apakah sudah terintegrasi dengan data BO?

14. Mba Ria: saat ini SIKaP sudah terintegrasi dengan data BO dari Kemenkumham.



Zoom Meeting

Participants (20)

Find a participant

DT Dhanu Trinandha - LKPP

K edi kristiyanto

EN Eko Nirwanto_LKPP

Kes Tuturoong - ICW

LL larasati lkpp

LM Linda Mikowati LKPP

NM Niken Mustikarini

R Rannu - LKPP

RA Resa Anggriani

RE Ria Ervina

RD Rizky Dwi Raharjo

TY Tri Yani LKPP

Invite Mute All

33°C Sebagian cerah

ENG INTL 14:01 07/06/2023

Remove Background Recording

Chitra Poespa

"Masih ada di antara kita yang bekerja untuk memberantas korupsi dan percaya itu mungkin"

Pahlawan Amibaka, Star Wars

Sahabat ICW

SAKTI UNCORRUP TED.

Unmute Start Video Security Participants Share Screen Reactions Apps Whiteboards More End

Zoom Meeting

Participants (20)

Find a participant

DT Dhanu Trinandha - LKPP

K edi kristiyanto

EN Eko Nirwanto_LKPP

Kes Tuturoong - ICW

LL larasati lkpp

LM Linda Mikowati LKPP

NM Niken Mustikarini

R Rannu - LKPP

RA Resa Anggriani

RE Ria Ervina

RD Rizky Dwi Raharjo

TY Tri Yani LKPP

Invite Mute All

33°C Sebagian cerah

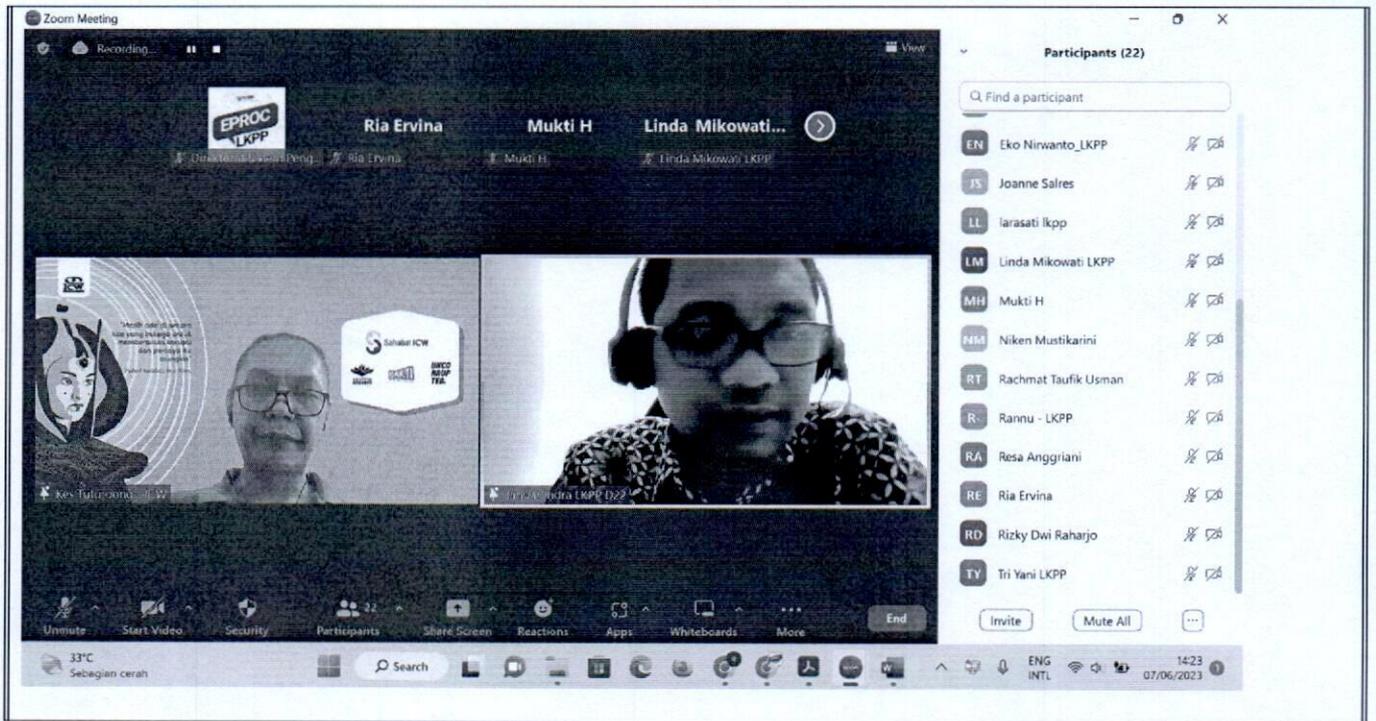
ENG INTL 14:02 07/06/2023

Recording

EPROC LKPP

Linda Mikowati...

Unmute Start Video Security Participants Share Screen Reactions Apps Whiteboards More End



Notulis,

Audita Octaviani

Mengetahui,
Analisis Kebijakan Muda
Direktorat Sistem Pengadaan
Digital

Linda Mikowati

Tutup Menu

- Dashboard
- RUP
- Penyerapan PDN/PBJ >
- Analisa
- Business Matching >

Dashboard Monitoring PDN Tahun Anggaran 2022

Nasional | Semua K/L/PD | Semua Eselon | Semua Satker | 2022 | More filter ...

Perencanaan

Updated: 19 June 2023

Rp 1060.78 T Paket RUP >
4,757,553

Penyedia **681.00 T** Swakelola **379.78 T**
[Lihat semua](#)

PDN: **Rp 594.72 T** NON PDN: **Rp 86.28 T**

87% 13%

Pelaksanaan

Updated: 28 June 2023

Rp 446.93 T Paket RUP >
899,195

Penyedia **435.30 T** Swakelola **11.64 T**
[Lihat semua](#)

PDN: **Rp 243.88 T** Proses Tagging PDN: **Rp 191.42 T**

56% 44%

Pembayaran

Updated: 01 July 2023

Rp 780.29 T Paket RUP >
0

Penyedia **780.29 T** Swakelola **0**

PDN: **Rp 50.35 T** Proses Tagging PDN: **Rp 729.95 T**

6% 94%



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Penilaian Sementara

INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN 2023

K/L/Pemda

Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan

SIRUP

Nilai RUP SIRUP dibandingkan dengan nilai belanja PBJ

Skor Max 10
Persentase 87%
Skor saat ini **8.52**

*Jika ≥ 50% maka dikali 10
Jika < 50% maka skor 0*

Basis data RUP TA 2023
Penarikan data 1 April 2023

*data per 01 April 2023

ePurchasing

Jumlah paket selesai dibandingkan jumlah paket aktif untuk ePurchasing (Katalog Elektronik)

Skor Max 4
Persentase 16%
Skor saat ini **0.31**

*Jika ≥ 50% maka dikali 4
Jika < 50% maka skor 0*

Basis data Katalog Elektronik TA 2022
Penarikan data 31 Januari 2023

non eTendering/ non ePurchasing

Nilai realisasi dibandingkan dengan nilai RUP untuk Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung

Skor Max 5
Persentase 50%
Skor saat ini **1.93**

*Jika ≥ 50% maka dikali 5
Jika < 50% maka skor 0*

Basis data SPSE (transaksional & pencatatan) dan RUP TA 2022
Penarikan data 31 Januari 2023

Skor total
19.72

Skor Max
30

Bobot
30%

eTendering

Nilai realisasi dibandingkan dengan nilai RUP untuk eTendering

Skor Max 5
Persentase 89%
Skor saat ini **4.38**

Toko Daring

Sudah pernah melakukan ePurchasing melalui Toko Daring

Skor Max 1
Nilai 1
Skor saat ini **0.70**

eKontrak

Jumlah paket dicatitkan dalam eKontrak dibandingkan jumlah paket transaksional

Skor Max 5
Persentase 78%
Skor saat ini **3.88**

Skor ITKP
48.11



Indikator
Kualifikasi &
Kompetensi
SDM PBJ

Skor saat ini
8.39

Indikator
Tingkat
Kematangan
UKPBJ

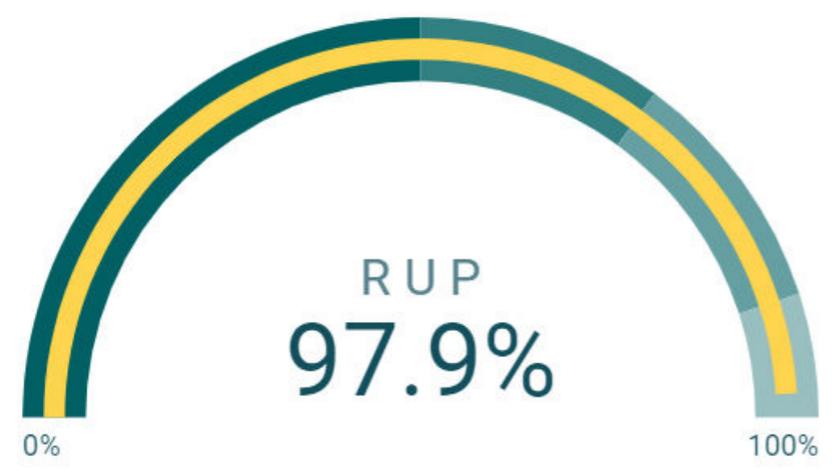
Skor saat ini
20.03



Overview Rencana Umum Pengadaan (RUP)

Data 26 Juni 2023

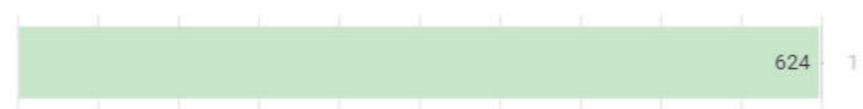
Tahun Anggaran **2022** **2023**



<50% >50-70% >70-90% >90-<100%

Nilai RUP = SIRUP Nasional dibandingkan total belanja PBJ

Total KLPD yang mengumumkan RUP

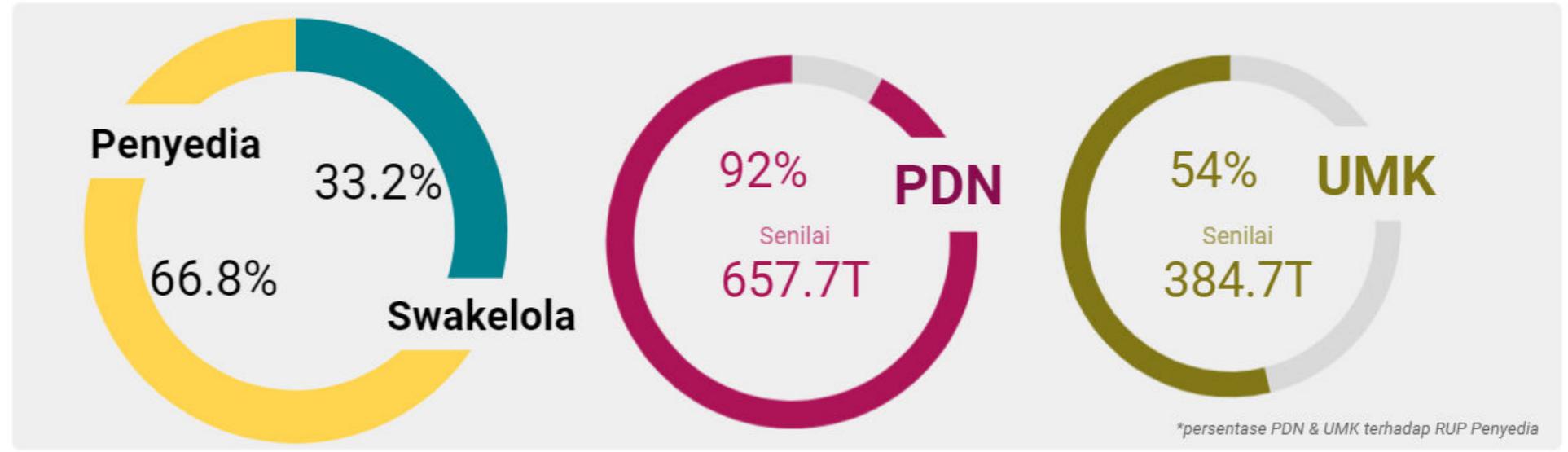


Total Paket
5,163,340

Pagu RUP
1,071.0T

Belanja Pengadaan
1,093.6T

**RUP melalui Penyedia dan Swakelola*



Pagu dan Paket per Jenis Pengadaan



Pagu dan Paket per Metode Pengadaan

